BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : SUARA PEMBARUAN
Subyek : Illegal Logging
Edisi : 18/September/2007
Hari : Selasa
Halaman : 3

"Illegal Logging" di Riau

Periksa Menteri Kehutanan

[JAKARTA] Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Polisi Sutanto diminta memeriksa Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban terkait kasus pembalakan liar (*illegal logging*) di Riau.

"Kapolda Riau pernah berjanji akan memeriksa Menhut dalam kasus *illegal logging* di Riau. Waktu itu kami dukung dan kagum dengan keberanian Kapolda seperti itu. Tapi lama-lama menjadi lembek dan sampai sekarang tidak terealisasi. Ada apa sebenarnya?" kata anggota Komisi III DPR, Benny K Harman dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri dan jajarannya di ruang rapat Komisi III DPR, Senin (17/9). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan.

Seperti yang pernah diberitakan, Kapolda Riau, Brigjen Pol Sutjiptadi dalam percakapan dengan *SP*, Jumat (13/4/2007), mengatakan, pihaknya telah menetapkan ratusan orang sebagai tersangka kasus *illegal logging.* Dia juga mengungkapkan, seorang menteri terlibat di dalamnya, dan ada kemungkinan menjadi calon tersangka. Namun, Kapolda belum bersedia menyebut identitas menteri tersebut.

"Kami masih mengembangkan penyidikan, dan tidak tertutup kemungkinan jumlah saksi dan tersangka bertambah. Guna menuntaskan pengusutan kasus ini, semua pihak mulai dari orang-orang di lapangan sampai pihak yang berwenang mengeluarkan izin atau dokumen terkait masalah hutan akan diperiksa," katanya.

Tidak lama setelah itu, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sisno Adiwinoto, mengatakan, Menhut MS Kaban diduga terlibat dalam kasus *illegal logging* di Riau, khususnya dalam pelanggaran administrasi, yakni mengeluarkan izin penebangan kayu. "Siapa pun yang terlibat dalam kasus tersebut, Polri akan menghadapkannya ke depan hukum," kata Sisno.

Tidak Diskriminatif

Benny mengatakan, antara Kapolri dan Menhut pernah saling menyalahkan dalam kasus pembalakan liar di Riau. Saling tuding seperti itu, kata dia, sangat memalukan. Sebab menunjukkan antara Kapolri dan Menhut tidak ada koordinasi. "Nah, kalau memang Kapolri merasa menegakkan hukum sesuai prosedur, mengapa mesti enggan memeriksa Menhut ?" kata dia.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Sutanto mengatakan, sampai saat ini proses hukum terhadap pembalakan liar di Riau terus berjalan. Akibat pembalakan liar, kata dia, hutan seluas 200 ribu hektare di Riau habis dibabat setiap tahun. "Sekarang tinggal 3,3 juta hektare hutan yang tersisa di sana. Jika didiamkan maka dalam 15 tahun ke depan akan habis," kata dia.

Kapolri mengatakan, pembalakan liar di Riau melibatkan 14 perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu, kata dia, sedang dalam proses penyidikan. "Hutan tidak bisa ditebangi dengan alasan untuk kesejahteraan," tambah dia. [E-8]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup